

ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENILAIAN KINERJA PUSAT BIAYA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINJAI

Anita¹⁾, Samsinar²⁾, Nuraisyiah³⁾

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Correspondence author: Anita, imanitaad13@gmail.com, Makassar, Indonesia

Abstract

The study aims to analyze accountability accounting in the assessment of the performance of the cost center reviewed from the budget and realization at the Financial and Asset Management Agency of the District of Sinjai District. The data sources used are the Regional Revenue and Purchasing Budget Realization Report and the Note on the Financial Report of the Financial and Asset Management Agency of the District of Sinjai District in 2022. The data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique uses quantitative descriptive techniques by measuring the cost efficiency of accounting accountability at the cost center. The results of the analysis showed that the accounting of responsibility at the Regional Financial Management Agency and the assets of the districts of Sinji District have been adequate by showing a well-structured organizational structure based on functions and main tasks. The accountable report that compares the estimated costs with the realization has been well compiled with account code classification and cost classification by the financial and asset management agency of the district of Sinai. The cost center has performed well in accordance with the budget set, but the cost account at the Sinjai District Financial and Asset Management Agency has not been classified according to the cost center on accountability accounting. The performance assessment of the cost center at the Finance and Assets District Management Agency of Sinjai County has been well proven by the existence of a clear system of rewards and punishment.

Keywords: accounting of responsibility, cost center, performance assessment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat biaya yang ditinjau dari anggaran dan realisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Teknik deskriptif kuantitatif dengan mengukur efisiensi biaya dari akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah memadai dengan memperlihatkan struktur organisasi yang terstruktur dengan baik berdasarkan fungsi dan tugas pokok. Laporan

pertanggungjawaban yang membandingkan antara biaya yang dianggarkan dengan realisasi, telah disusun dengan baik dengan pengklasifikasian kode rekening dan penggolongan biaya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dan tidak ada penyimpangan yang terjadi. Pusat biaya dilakukan dengan baik sesuai dengan anggaran yang ditetapkan namun akun biaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai tidak digolongkan berdasarkan pusat biaya pada akuntansi pertanggungjawaban, penilaian kinerja pusat biaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah berjalan dengan baik dibuktikan dengan terdapatnya sistem *rewards* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi) yang jelas.

Kata Kunci : akuntansi pertanggungjawaban, pusat biaya, penilaian kinerja

A. PENDAHULUAN

Instansi akan mengkoordinasikan kegiatan berdasarkan dari visi misi instansi tersebut, dari visi misi itu akan muncul strategi yang jitu sebagai jalan meraih tujuan. Suatu usaha untuk mengarahkan proses pada rencana yang telah ditentukan terlaksana secara strategis disebut pengendalian (Fahmi, 2022). Sebuah instansi dalam pengambilan keputusan dan tanggungjawab menjalankan kegiatan memerlukan pendelegasian. Pimpinan instansi yang besar dan berkembang tidak dapat mengendalikan pekerjaan bawahannya secara langsung, wewenang yang didelegasikan dari pimpinan ke tingkat pimpinan dibawahnya menuntut tingkat pimpinan bawahan ini mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan wewenang kepada pimpinan. Pada tingkat pimpinan bawahan mengetahui dengan jelas wewenang apa yang didelegasikan kepadanya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban (Muttaqin, 2018).

Terlihat bahwa akuntansi manajemen sangat dibutuhkan yang paling utama dalam penyusunan sistem akuntansi pada suatu instansi. Agar menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai fungsi maka sistem akuntansi yang digunakan harus disusun sedemikian rupa sehingga instansi mampu melakukan evaluasi dan mengukur seberapa efektif atau efisien pada para pimpinan bagian menjalankan tugas sesuai yang ditentukan instansi terkait. Sistem

akuntansi yang dimaksudkan dalam penyusunan dan didesain khusus ini disebut akuntansi pertanggungjawaban (Hasna & Rachman, 2020).

Salah satu alat ukur bagi manajemen untuk mampu menilai kinerja pimpinan pada suatu organisasi secara baik adalah dengan adanya informasi akuntansi pertanggungjawaban (*Responsibility Accounting Information*). Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada pengelola terkait yang bertanggungjawab terhadap aktivitas tersebut (Siregar et al., 2017).

Akuntansi pertanggungjawaban menjadi suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawabannya didalam instansi atau organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban berupa sebuah model pengendalian dan evaluasi kinerja baik di anak instansi, cabang atau divisi yang memberikan kendali. Akuntansi pertanggungjawaban terutama sebagai alat pengawas aktivitas dan biaya setiap pusat pertanggungjawaban (Martianti & Iriyadi, 2020).

Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam

rangka melaksanakan sebagian kegiatan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya (Halim & Kusufi, 2014). Hal ini penting mengingat evaluasi kinerja merupakan bagian terpenting dari kerja internal instansi. Kinerja merupakan prestasi kerja atau pencapaian yang dapat diterima sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya dalam periode tertentu (Santoso et al., 2021). Kinerja mengarah pada masa depan, secara jelas disesuaikan dengan keadaan spesifik masing-masing organisasi/instansi, dan didasarkan pada model yang mengaitkan hubungannya dengan input dan output. Tolak ukur dan evaluasi kinerja adalah tolak ukur dan evaluasi hasil, penilaian adalah pengelolaan operasi instansi selama periode tertentu (Tsauri, 2014).

Pengendalian biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatan organisasi perlu dilakukan untuk meminimalkan resiko, akuntansi pertanggungjawaban berguna menunjang pengendalian biaya (Teruna & Noor, 2021). Kondisi akuntansi pertanggungjawaban yang tidak sesuai masih sering dijumpai di dalam instansi, kesenjangan antara anggaran dan pelaksanaan atau realisasi karena tingkat akuntabilitas tidak diurutkan dengan baik untuk masing-masing fungsi. Kurangnya perbedaan antara biaya terkendali dan tidak terkendali membuat sulit untuk menentukan anggaran dan siapa yang mestinya bertanggungjawab atas situasi yang terjadi (Ana Fatmawati, 2019).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 57 Tahun 2019. Dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Tugas

Bupati yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Terkait dengan peningkatan kinerja pusat biaya pada anggaran dan realisasi dalam laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Perlu diperhatikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memperlihatkan jumlah pembiayaan yang dianggarkan dari tahun ketahun.

Berikut ini data anggaran dan realisasi pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021 dan 2022.

Tabel 1 Data Anggaran & Realisasi
Pembiayaan pada BPKAD TA. 2021 dan
2022

| Tahun | Anggaran | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|
| 2021 | Rp. 86.129.250.616 | Rp. 86.129.250.616 |
| 2022 | Rp. 46.187.839.996 | Rp. 57.260.302.030 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kab. Sinjai, 2022 (data diolah)

Berdasarkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan anggaran pembiayaan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2022 terlihat realisasi lebih besar dibanding dengan anggaran yang disiapkan, ini menunjukkan jumlah pembiayaan di tahun 2022 dimana realisasi dengan anggaran yang tidak seimbang, terjadi karena tidak dibayarkannya pinjaman dalam kelompok pengeluaran pembiayaan pada pembayaran pokok pinjaman dari pemerintah pusat yang terdapat anggaran sebesar Rp 11.070.712.034 namun realisasinya tidak ada atau nol. Hal ini bisa saja mengakibatkan penambahan bunga pinjaman pada tahun berikutnya.

Kinerja dari pusat biaya dapat dikatakan baik jika pusat biaya telah melaksanakan aktivitas operasional instansi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab (da Lopez et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang digunakan tidak melebihi anggaran atau dapat dikelola secara efisien selama operasional. Dari uraian ini, akuntansi pertanggungjawaban dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi kinerja.

Akuntansi pertanggungjawaban mengharuskan setiap pimpinan berpartisipasi dalam menyusun laporan kinerja tepat waktu yang membandingkan kinerja dengan realisasi dan anggaran.

B. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian yang akan dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, dengan menganalisis akuntansi pertanggungjawaban melalui kinerja pimpinan pusat biaya. Maka untuk memperoleh hasil penelitian perlu adanya penelitian komperatif pada pertimbangan kenaikan produktivitas, manajemen memerlukan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa pendapatan dan biaya untuk menjabarkan relisasi dan anggaran yang ada.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai yaitu Kepala Bidang Akuntansi melalui wawancara, serta data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2022 yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan pengambilan data terdapat objek penelitian. Pengumpulan data lapangan yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian Pustaka dilakukan dengan pengumpulan data teoritis

dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban dan berfokus pada salah satu pusat pertanggungjawaban yaitu pusat biaya. Dengan ini, peneliti dapat mengetahui kinerja pusat biaya dengan melihat perkembangan, posisi dan kemajuan dalam rentang waktu tertentu. Teknik analisis laporan anggaran dan realisasi biaya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan dan perubahan-perubahan yaitu menggunakan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Pusat Biaya

Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat untuk mengukur kinerja dari setiap pusat pertanggungjawabannya, salah satunya yang akan kita ukur ialah pusat biaya dimana kinerja tersebut dapat dibandingkan antara anggaran kegiatan/biaya dengan realisasi kegiatan/biaya. Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala bidang akuntansi mengatakan bahwa terdapat batas signifikan anggaran karena dalam menerapkan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai terdapat aturan pemerintah yang diikuti. Sehingga biaya-biaya yang di anggarkan telah mengikuti peraturan yang ada. Berdasarkan kesempatan wawancara tersebut kepala bidang Akuntansi mengatakan terkait prosedur anggaran biaya menyesuaikan dengan Permendagri 77 dan setiap tahunnya diterbitkan pedoman penyusunan anggaran. Hal tersebut penting dalam penyusunan anggaran pusat biaya yang ada dalam laporan realisasi anggaran.

1. Pendapatan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mengalami peningkatan antara 2-3% per tahun dengan asumsi setiap tahun dapat dilakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten Sinjai dari sumber-sumber dana perimbangan dan pendapatan lain-lain, pemerintah kabupaten Sinjai terus meningkatkan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

- a. Pendapatan Asli Daerah dengan persentase 105% dan Varians -5%. Persentase 105% menunjukkan indikator menguntungkan karena realisasi lebih besar dibandingkan dengan anggaran hal tersebut menunjukkan ekonomi daerah lebih kuat dari yang diharapkan, dan pengelola keuangan dapat dianggap efisien. Pemerintah dapat mempertimbangkan opsi untuk mengalokasikan kelebihan anggaran untuk proyek pembangunan atau pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Varians -5% itu berarti realisasinya 5% lebih tinggi dari yang dianggarkan. Pada pendapatan Asli Daerah menandakan tidak ada sisa anggaran atau tidak ada persentase realisasi yang belum terlaksana atau dalam kondisi baik. Persentase tersebut berasal dari penyerapan anggaran lebih yaitu pada pajak hotel, pajak restoran, pajak penggelaran seni pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, dan pajak bumi dan bangunan. Jumlah penyerapan anggaran sebesar Rp 6.289.144.603.
- b. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dengan persentase 99% dan Varians 1%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat bergantung pada dana perimbangan untuk pembiayaan operasional dan Pembangunan. Dengan persentase yang tinggi seperti itu, pemerintah daerah memiliki keterbatasan

dalam menghasilkan pendapatan sendiri melalui sumber-sumber PAD lainnya. Namun, varians 1% menunjukkan bahwa pendapatan dari sumber-sumber ini cenderung stabil dari waktu ke waktu. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer dana perimbangan juga bisa beresiko jika ada perubahan dalam kebijakan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi tingkat transfer tersebut. Hal tersebut terjadi karena terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar 1% atau Rp 14.215.393.522 dikarenakan program kerja yang ada telah terlaksana sepenuhnya namun dana yang digunakan hanya sebesar realisasi yang ada.

- c. Pendapatan Transfer Lainnya dengan persentase 100% dan Varians 0%. Persentase tersebut menunjukkan realisasi sesuai dengan anggaran yang ada, terlihat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah berhasil mengelola sumber pendapatan ini sesuai dengan perkiraan dan anggaran yang ditetapkan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai terlihat mengandalkan sumber pendapatan ini dan tidak memiliki variasi dalam jumlah yang diterima dari waktu ke waktu. Hal tersebut menandakan anggaran sepenuhnya terserap.
- d. Pendapatan Transfer Antar Daerah memiliki persentase 108% ini berarti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai menerima lebih banyak dana transfer dari daerah lain dari pada yang telah mereka anggarkan atau perkiraan sebelumnya. Varians -8% menunjukkan bahwa realisasi memiliki lebih 8% dari anggaran yang disediakan, jumlah dana yang diterima dari transfer tersebut konsisten dan tidak mengalami variasi dari waktu ke waktu dan menunjukkan bahwa tidak ada anggaran yang belum atau tidak terealisasi. Situasi ini baik karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai

memiliki sumber pendapatan tambahan yang lebih besar dari yang diharapkan. Sehingga terdapat realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 5.243.549.961.

- e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki persentase 100% dengan varian 0% menunjukkan anggaran terealisasi dengan baik dengan varians 0% ini terlihat bahwa anggaran sepenuhnya terealisasi. Akun yang terealisasi tersebut berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp3.000.000.000

Berdasarkan data maka jumlah pendapatan yang memiliki persentase 99% dan varians 1% ini cukup baik meski tidak melebihi dari target anggaran yang di tetapkan dengan varians 1 % atau sebesar Rp 1.682.698.958.

2. Pusat Biaya

Berpedoman pada prinsip belanja daerah yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, belanja daerah tahun 2022 akan dipergunakan untuk memadai pelaksanaan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Ouput/Belanja Operasi. Belanja Operasi dengan persentase 94% dan varian 6%. Persentase 94% atau sebesar Rp 794.820.548.096 ini menunjukkan realisasi yang tidak melebihi anggaran yang di tentukan dan dapat dikatakan baik selama

realisasi tidak melebihi anggaran meski pada akun dalam belanja operasi dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, hibah dan bantuan sosial. Belanja ini tidak terealisasi secara penuh karena masih terdapat akun-akun yang tidak dianggarkan atau nihil pada tahun 2022 karena pada bantuan sosial telah berjalan program bantuan sosial tetapi anggaran yang digunakan dari sumber-sumber yang lain. Varians 6% ini menunjukkan masih ada 6% atau sebesar Rp 44.638.326.725 anggaran yang belum terealisasi karena kebutuhan belanja operasi ini hanya terealisasi di beberapa SKPD saja karena masing-masing SKPD memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hal tersebut menandakan program kerja terealisasi namun anggaran yang disediakan tidak habis terpakai. Berikut komponen belanja operasi:

- 1) Belanja Pegawai untuk pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 2022 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp 483.062.991.430 dan terealisasi sebesar Rp 454.432.988.639 atau mencapai 94% dengan varians 6% atau sebesar Rp 28.630.000.791. Persentase tersebut berasal dari program kerja yang sepenuhnya tidak terealisasi untuk tahun 2022 yaitu tambahan penghasilan Guru PNSD dan jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN yang memiliki persentase 59% dan 64%.
- 2) Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp 312.365.317.337, dan terealisasi sebesar Rp 297.702.450.340, atau mencapai 95% memiliki persentase varians 5% atau sebesar Rp 14.662.866.997 yang anggarannya tidak terserap. Terdapat program kerja yang terealisasi namun anggaran yang disediakan tidak habis terpakai. Terdapat akun yang tidak dianggarkan atau nihil yaitu belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker dan

- belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, hal tersebut terjadi karena akun tersebut tidak menjadi prioritas dalam belanja pada tahun 2022.
- 3) Belanja Bunga merupakan belanja yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten Sinjai untuk pembayaran bunga pinjaman kepada PT Bank Sulselbar. Pada tahun 2022, Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp157.500.000, dan terealisasi sebesar Rp106.250.000 atau mencapai 68% dan varians 32% atau sebesar Rp 51.250.000 berasal dari pembayaran atas bunga kredit pemerintah kabupaten sinjai tahun 2022 untuk bulan januari 2022 yang anggarannya tidak terserap atau tidak habis terpakai tetapi program kerja terealisasi karena untuk nilai pembayaran tersebut hanya sebesar realisasi yang ada. Pada belanja ini terdapat akun yang tidak dianggarkan atau nihil pada tahun yaitu pembayaran bunga akun kredit pemerintah dan pembayaran biaya provinsi 1% dari jumlah pinjaman dana PEN dalam rangka pemulihan ekonomi pada PT Sarana Multi Infrastruktur.
 - 4) Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp39.464.811.054 dan terealisasi sebesar Rp38.436.786.116 atau mencapai 97% dan varians 3% atau sebesar Rp 1.028.024.938. Terdapat akun yang tidak dianggarkan atau nihil karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, belanja hibah dapat berupa uang ataupun barang/jasa. penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Varians 3% berasal dari anggaran yang tidak terserap penuh yaitu belanja hibah utang kepada pemerintah pusat 88%, belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba 99%, belanja hibah kepada badan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 95% dan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik 91%.
 - 5) Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai kepada anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 4.408.255.000 dan terealisasi sebesar Rp 4.142.073.000 atau 94% dan varians 6% atau sebesar Rp 266.182.000 anggaran yang tidak terserap karena program kerja yang teralisasi tetapi nilai yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran.
- b. Biaya Input/Belanja Modal
Berupa Belanja Modal pada tahun 2022, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 203.623.761.173 dan terealisasi sebesar Rp 173.509.624.457 atau mencapai 85% dari anggaran merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Program kerja yang ada pada belanja modal terdapat yang telah terealisasi namun anggaran yang disediakan tidak habis terpakai. Belanja

modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis belanja aset yaitu:

- 1) Belanja Peralatan dan Mesin, tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 40.005.041.870 dan terealisasi sebesar Rp 38.796.496.323 atau mencapai 97% dari anggaran dan varians 3% atau sebesar Rp 1.208.545.547 terdapat program kerja yang terealisasi namun anggaran yang tidak habis terpakai.
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 39.452.375.416 dan terealisasi sebesar Rp 38.652.373.221 atau mencapai 98% dan varian 2% atau Rp 800.002.195 dari anggaran. Realisasi tersebut berasal dari belanja modal bangunan Gedung tempat kerja 98% dan belanja modal bangunan tempat tinggal 98% yang masing-masing tidak habis terpakai sebesar 2% meski anggaran telah terealisasi.
 - 3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 122.468.107.267 dan terealisasi sebesar Rp 94.442.147.312 atau mencapai 77% dan varian 33% atau sebesar Rp 28.025.959.955 dari anggaran yang tidak terealisasi. Hal tersebut terjadi karena terdapat program kerja yang terealisasi tetapi anggaran tidak habis terpakai yaitu belanja jalan 74%, belanja modal bangunan air irigasi 96%, belanja modal bangunan pengamanan Sungai/Pantai dan pengendalian bencana alam 92%, belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah 58%, belanja modal bangunan air kotor 95%, belanja modal instalasi air bersih 61% dan belanja modal jaringan Listrik 92%.
 - 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dianggarkan sebesar Rp 1.698.236.620 dan terealisasi sebesar Rp 1.618.607.600 atau mencapai 95% varian 5% atau sebesar Rp 79.629.020 dari anggaran. Persentase tersebut berasal dari belanja modal bahan perpustakaan 100%, belanja modal aset tidak berwujud 99%, belanja modal aset tetap lainnya Dana BOS 77% dan belanja modal Aset Tetap Lainnya BLUD 95%, terdapat varians 5% program kerja tersebut terealisasi tetapi anggaran tidak habis terpakai dan terdapat akun barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang tidak dianggarkan pada tahun 2022 karena tidak menjadi prioritas belanja modal pada tahun 2022. Terdapat akun yang tidak terealisasi atau nihil yaitu Belanja Aset Lainnya yang dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset tahun 2022. Dan belanja Tanah realisasinya nihil karena memang tidak dianggarkan pada tahun 2022 karena tidak diperlukan lahan baru.
 - 5) Belanja Tak Terduga pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.591.457.979 dan terealisasi sebesar Rp 273.465.840 realisasi tersebut berasal dari Bantuan operasional satuan tugas kewaspadaan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku di kabupaten sinjai sesuai Keputusan Bupati Sinjai Nomor 835 tahun 2022.
- c. Biaya Proses/Belanja Transfer
- Berupa belanja transfer pada tahun 2022 pada APBD perubahan tahun 2022 Kabupaten Sinjai transfer dianggarkan sebesar Rp 122.480.598.114 dan terealisasi sebesar Rp 122.477.082.074 atau sebesar 10%.
- 1) Transfer bagi Hasil Pajak terdapat anggaran yang tidak habis terserap sebesar 1% tetapi program kerja yang dianggarkan tersebut terealisasi.

- 2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp 940.348.480 dibandingkan pada tahun 2022 realisasi transfer bagi hasil pendapatan lainnya sebesar Rp 1.190.941.589 atau mencapai dari anggaran sebesar Rp 1.191.538.760 sepenuhnya terealisasi tetapi tidak habis terpakai.
- 3) Transfer Bantuan Keuangan kabupaten/kota ke desa dianggarkan sebesar Rp 119.465.966.899 atau 100% dan terealisasi sesuai jumlah anggaran ini berasal dari belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp 63.693.673.000 dan belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp 55.772.293.900. transfer bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi tahun 2022 tidak dianggarkan atau nihil karena akan memanfaatkan nilai anggaran yang lain yang tidak terealisasi.
- 4) Transfer Bantuan Keuangan memiliki persentase 100% dan varians 0% menunjukkan bahwa seluruh bantuan keuangan sepenuhnya diterima oleh pemerintah tanpa fluktuasi atau variasi dalam jumlah yang diterima. Hal ini menunjukkan stabilitas dan kepastian dalam penerimaan bantuan keuangan oleh pemerintah yaitu dari kota ke desa.

Jumlah belanja dan transfer yang memiliki persentase 93% dan varians 7% ini cukup baik hal tersebut menunjukkan tingkat fluktuasi yang sedang dalam pola pengeluaran dan transfer tersebut. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pengeluaran dan transfer yang dapat mempengaruhi perencanaan keuangan dan alokasi sumber daya di pemerintahan. Terlihat pada laporan realisasi anggaran terdapat surplus anggaran sebesar sebesar Rp 28.203.432.665, nilai surplus tersebut

dapat dimanfaatkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Akuntansi Ibu Indriani sebagai berikut “Terkait dengan penyusunan APBD itu memang dikenal adanya surplus/difisit anggaran kalau terjadi surplus itu kita menghitung berapa surplusnya sehingga kita biasa memanfaatkan menjadi belanja ditahun yang berkenaan jika terjadi defisit maka akan dilakukan pengurangan belanja atau menambah pendapatan sehingga antara belanja dan pendapatan bisa dalam kondisi nol atau sehat sekira itu”.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun anggaran tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- a. Penerimaan Pembiayaan anggaran sebesar Rp 75.258552.030 dan realisasinya Rp 75.258552.030 sehingga persentase 100% dan varians 0%. Persentase tersebut berasal dari penggunaan SiLPA dan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp 1.750.000. Penerimaan pembiayaan telah tercapai sepenuhnya hal ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.
- b. Pengeluaran Pembiayaan anggaran sebesar Rp 29.070.712.034 dan realisasi Rp 18.000.000.000 menunjukkan persentase 62% dan varians 38% atau sebesar Rp 11.070.712.034. Terdapat perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan dari anggaran yang ditetapkan. Terdapat program kerja yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi yaitu pembayaran pokok pinjaman dari

pemerintah pusat. perbandingan ini menunjukkan tidak menguntungkan karena meski anggaran lebih besar dibanding dengan realisasi tetapi program kerja tidak terlaksana dan menimbulkan beban pokok pinjaman pada tahun berikutnya.

Penilaian Kinerja

Berdasarkan fungsinya, penilaian kinerja dalam akuntansi pertanggungjawaban diukur dengan membandingkan realisasinya dengan apa yang telah dianggarkan pemerintah. Sistem penilaian kinerja sebaiknya dilakukan oleh pengelola dalam mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta digunakan sebagai dasar pengelola seandainya terjadi penyimpangan. Pihak pengelola dalam melakukan penilaian kinerja, menetapkan batas wewenang, tanggungjawab serta kriteria atau tolak ukur yang digunakan dalam menilai kriteria tercermin dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atau laporan realisasi anggaran.

Terkait dengan penilaian kinerja BPKAD Kabupaten Sinjai melakukan evaluasi kinerja berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sinjai Ibu Indriani sebagai berikut: “Yaa khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu melakukan evaluasi terhadap para pegawai hal ini dapat dilihat dari presentase kehadiran dan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing pegawai untuk pemerintah daerah Sinjai khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah kita itu untuk menilai menerapkan absensi yang diberlakukan kemudian ada yang dinamakan E- Nikda (Elektronik Penilaian Kinerja Disiplin Aparatur) itu berupa alat yang digunakan untuk menjelaskan apa yang dilakukan setiap hari semua dicatat pada platform tersebut dan ada semacam melakukan pinjer semacam alat digunakan untuk kehadiran”.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai yang lebih berwenang dalam menilai prestasi kerja tiap

bagian yaitu Kepala Badan yang dibantu oleh masing-masing kepala bidang. Terdapat indikator yang disebutkan oleh Kepala Bidang Akuntansi Ibu Indriani pada kesempatan wawancara sebagai berikut: “Untuk indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja yaitu kita harus melihat dari kehadiran pegawai bagaimana kualitas kerja artinya kualitas kerja disini adalah tugas dan tanggungjawab, apakah telah diselesaikan kemudian apa pekerjaan itu telah dilakukan dengan tepat waktu, kemudian ada presensi kerja ada kesiapan dan kerja sama atau tim work bagaimana pegawai membangun kerja sama dalam suatu tim atau dalam suatu bidang dan kemudian inisiatif dari pada pegawai itu adalah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai”.

Pada kepala bidang yang mampu menggunakan anggaran biaya secara efektif dan efisien serta mampu mengendalikan biaya-biaya yang menjadi tanggungjawabnya, akan mendapat penghargaan (reward) dalam bentuk apapun atas prestasinya tersebut dan sebaliknya jika terdapat penyimpangan mengelola anggaran biaya maka akan di berikan sanksi (Punishment). Hal tersebut turut dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi Ibu Indriani sebagai berikut: “Yaa untuk pmda secara keseluruhan ini punishment ada beberapa pegawai tapi bukan dalam lingkup pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah tetapi ada beberapa di OPD lain yaitu memberikan punishment berupa tidak dibayarkan gajinya kemudian ditunda kenaikan pangkat dan kalau untuk yang kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja yaitu diberikan penghargaan misalnya dengan waktu tahun lalu diberikan penghargaan semacam sertifikat dan bonus yaitu TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) karena telah bagus kinerjanya hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk motivasi kerja pegawai”.

Sehingga mereka termotivasi dalam meningkatkan kinerja dan rasa ikut mempertahankan tanggungjawab dalam

pengendalian dan penggunaan biaya yang menjadi tanggungjawabnya.

Pembahasan

Akuntansi Pertanggungjawaban

Untuk mendapatkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang lebih baik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai perlu penyempurnaan dalam pemenuhan akuntansi pertanggungjawaban yang berfokus pada pusat biaya sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah dijalankan dengan baik, menunjukkan aliran pertanggungjawaban dari pimpinan paling atas ke pimpinan paling bawah yaitu dari kepala badan ke kepala bidang sampai dengan sub bidang, serta terdapat pembagian tugas yang maupun pemisahan fungsi secara tegas dan jelas dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

2. Anggaran Biaya

Proses penyusunan anggaran di lakukan oleh tim anggaran yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Dalam menetapkan anggaran sepenuhnya melibatkan kepala bidang anggaran yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

3. Pengklasifikasian Kode Rekening

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah melakukan pengkodean rekening untuk setiap perkiraan sudah cukup memadai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengkodean rekening antara lain dengan menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya karena biaya yang terjadi dikumpulkan sesuai bagian pengelola. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mulyandani & Supriatna, 2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kode akun sangat penting dilakukan untuk mempermudah dalam melihat dan

mengklasifikasi data keuangan yang tergolong cukup banyak.

4. Penggolongan biaya

Penggolongan biaya yang dimaksud pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai ialah Biaya terkendali berupa belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi adalah belanja yang terkait dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau asset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya tidak terkendali berupa belanja tidak terduga yaitu belanja yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

5. Laporan pertanggungjawaban

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan anggaran dan realisasi selama 1 periode beserta presentase dari realisasi dengan anggaran yang ada dan membandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut sesuai dengan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Permendagri 77 yang menjadi pedoman dalam menyusun RKA sampai dengan penyusunan APBD yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam pedoman penyusunan anggaran.

Pusat Biaya

Pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sinjai perlu dilakukan anggaran biaya untuk itu akuntansi pertanggungjawaban dilakukan analisis pusat biaya dimana pusat biaya yang dimaksud terdiri dari:

1. Biaya Output/Belanja Operasi

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka biaya output pada Badan pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sinjai untuk pemanfaatan anggaran dan realisasi dilakukan secara baik yaitu dengan pelaksanaan program kerja yang terealisasi namun anggaran tidak habis terpakai.

2. Biaya Input/Belanja Modal

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka biaya input pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sinjai untuk pemanfaatan anggaran dan realisasi dilakukan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik karena hal tersebut masih terdapat kelebihan anggaran yang disebabkan penundaan pengerjaan proyek atau pembangunan jalan dan irigasi yang belum merata untuk tahun 2022.

3. Biaya proses/Belanja Transfer

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka biaya proses pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sinjai untuk pemanfaatan anggaran dan realisasi dilakukan sepenuhnya dijalankan dengan baik karena anggaran sepenuhnya terealisasi.

Laporan realisasi menyajikan data pendapatan dan belanja yang menyajikan pendapatan sebesar Rp 1.119.284.153.133, belanja sebesar Rp 968.603.638.393 dan transfer sebesar Rp 122.477.082.074, maka pemerintah kabupaten Sinjai mengalami surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja dan transfer) sebesar Rp 28.203.432.665 yang mampu dimanfaatkan untuk pembiayaan yang mencerminkan laporan realisasi anggaran yang sehat.

Untuk menunjang pusat biaya tersebut perlu diperhatikan pendapatan yang dihasilkan dan pemanfaatan pembiayaan, berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka pengelolaan anggaran pendapatan BPKAD Kabupaten Sinjai pada tahun 2022 belum sepenuhnya dijalankan karena masih tersisa varians 1% dengan berbagai program kerja yang telah dijelaskan pada analisis data. Meski dengan kondisi tersebut pendapatan masih kondisi baik.

2. Pembiayaan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka pemanfaatan pembiayaan BPKAD Kabupaten Sinjai pada tahun 2022 sepenuhnya dijalankan terlihat dari laporan realisasi anggaran yang menunjukkan sisa lebih pembiayaan anggaran yang nol atau sehat.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dalam akuntansi pertanggungjawaban diukur dengan membandingkan realisasinya dengan apa yang telah dianggarkan pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang akuntansi mengatakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai terdapat tahapan atau mekanisme yang dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban yaitu tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan atau pertanggungjawaban dan pengevaluasian. Berdasarkan hal tersebut dilakukan tolak ukur kinerja dilihat dari seberapa besar realisasi yang telah dicapai dengan apa yang telah dianggarkan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hananingrum & Pravitasari, 2022) dalam penelitiannya menjelaskan penilaian kinerja instansi KBPPPA Kabupaten Tulungagung belum menggunakan sistem *rewards* dan *punishment* dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang menjadi alat penilaian kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sinjai menerapkan sistem Penghargaan (*Rewards*) dan hukuman (*Punishment*) dalam proses penilaian kinerja dimana pegawai yang memiliki kinerja yang baik akan diberikan sebuah penghargaan seperti sertifikat ini bertujuan untuk mendorong motivasi kerja bagi pegawai dan untuk pegawai yang terdapat kinerja buruk maka akan diberikan (*Punishment*) berupa tidak dibayarkan gajinya dan ditunda kenaikan pangkat, hal tersebut dipaparkan oleh kepala bidang akuntansi. Indikator penilaian kinerja yang digunakan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai yaitu dengan melihat kehadiran pegawai dengan menerapkan presensi pegawai dan melihat kualitas kerja seperti pekerjaan yang diberikan diselesaikan dengan tepat waktu disiplin, dan membangun kerja sama. Berdasarkan hal tersebut penilaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah memadai berdasarkan analisis data yang menunjukkan laporan realisasi anggaran yang sehat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah memadai, karena telah memaparkan adanya struktur organisasi yang menunjukkan kodefikasi fungsi dan tugas pokok secara rinci. Laporan pertanggungjawaban yang membandingkan antara biaya yang dianggarkan dengan realisasi, telah disusun dengan baik dengan pengklasifikasian kode rekening dan penggolongan biaya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, bahkan tidak ada penyimpangan yang terjadi ini merupakan penilaian kinerja yang memadai kepada masing-masing kepala bidang.

Pusat biaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sepenuhnya dijalankan dengan baik dengan anggaran yang terealisasi sepenuhnya dan anggaran yang tidak habis terpakai tetapi program kerja telah dijalankan. Pendapatan yang ada dikelola dengan baik dan pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan kondisi baik yang diinginkan.

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat biaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah berjalan dengan baik dibuktikan

dengan terdapatnya system penghargaan (*rewards*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Fatmawati. (2019). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i1.3>
- da Lopez, P. A. S., Alexander, S. W., & Latjandu, L. D. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya Pada Hotel Sutanraja Amurang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 312–322. <https://doi.org/10.32400/gc.16.4.36815.2021>
- Fahmi, I. (2022). *Pengantar Sistem Pengendalian Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hananingrum, N., & Pravitasari, D. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajerial Pusat Biaya Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bsinis Syariah*, 4(1), 62–78. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17101>
- Hasna, D. L., & Rachman, R. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada PT. Taspen (Persero) KC Bogor. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 67–76.

<https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.422>

- Martianti, M. A., & Iriyadi, I. (2020). Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Biaya Studi Kasus Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 49–56. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.334>
- Mulyandani, V. C., & Supriatna, I. (2021). Rancangan Sistem Akuntansi Pokok Lembaga Pengelola Masjid Untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus DKM At-Taqwa KPAD dan Luqmanul Hakim POLBAN). *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 6(1), 14–33. <https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.841>
- Muttaqin, G. F. (2018). Pengaruh Pendelegasian Wewenang Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2), 159–176. <https://doi.org/10.35448/jrat.v11i2.4255>
- Santoso, R. T., Syukri, M., Ermawati, D. A. P., & Hasanah, N. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.325>
- Siregar, B., Suropto, B., Hapsoro, D., Lo, E. W., & Biyanto, F. C. (2017). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Teruna, A. Y., & Noor, M. Y. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya. *Jurnal Cross-Border*, 4(2), 780–795.
- Tsauri, S. (2014). *Manajemen Kinerja*. Jember : STAIN Jember Press.